

**PENDALAMAN DAN PRAKTIK KEBANGSAAN (PETIK)
SEBAGAI ALTERNATIF PENGUATAN PENDIDIKAN
BERKARAKTER PANCASILA DI INDONESIA
(STUDI KASUS PELAKSANAAN PROGRAM
KEMAHASISWAAN PETIK UTM)**

Helmy Boemiya

Universitas Trunojoyo Madura
helmy.boemiya@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Permasalahan terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan penguatan, sebab hal tersebut merupakan pembangunan karakter bangsa. Pada beberapa fakta dewasa ini telah terjadi upaya penurunan kualitas nilai-nilai kebangsaan dan dinamika perdebatan Pancasila yang terus menerus hadir. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Perpres No 7 Tahun 2021 tentang RAN PE. Beberapa instansi dan lembaga telah melakukan terobosan guna menguatkan Pendidikan karakter Pancasila, salah satunya yang dilakukan oleh UTM melalui model alternatif penguatan pendidikan karakter Pancasila dalam bentuk Pendalaman dan Praktik Kebangsaan (Petik). Maksud dan tujuan dilakukannya Petik ialah meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang wawasan kebangsaan dan karakter Pancasila, menambah jaringan antar mahasiswa dan masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan bangsa dan Pancasila. Metodenya dilakukan secara sederhana dengan melibatkan dosen pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan mahasiswa sebagai mentor (pendamping) dan mahasiswa baru sebagai peserta. Fokus utama pemberian 3 materi utama dan 3 tugas praktik kekinian.

Kata Kunci: *Pendalaman, Praktik Kebangsaan, Pendidikan berkarakter.*

Abstract

Problems related to national insight and Pancasila values need to be strengthened, because this is the development of the nation's character. In some facts today there have been efforts to reduce the quality of national values and the dynamics of the Pancasila debate that continues to exist. Several policies have been issued by the government, one of which is Presidential Decree No. 87 of 2017 concerning Strengthening Character Education and Presidential Regulation No. 7 of 2021 concerning NAP PE. Several agencies and institutions have made breakthroughs to strengthen Pancasila character education, one of which is carried out by UTM through an alternative model of strengthening Pancasila

character education in the form of Nationalization and Practice (Ptik). The purpose and objective of Petik is to increase students' knowledge about national insight and the character of Pancasila, to increase networks between students and the community in strengthening national unity and integrity, to be able to implement national values, love for the homeland, national unity and Pancasila. The method is carried out in a simple way by involving lecturers who teach Pancasila and Citizenship, with students as mentors and new students as participants. The main focus is providing 3 main materials and 3 current practical tasks.

Keywords: *deepening, national practice, character building.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki perekat persatuan bangsa yang merupakan landasan awal negara ini berdiri, yaitu Pancasila. Bahkan beberapa pakar menyatakan dengan tegas negara Indonesia adalah negara hukum yang berkarakter Pancasila. Secara historis, perumusan hingga disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, telah terkaji dialektika yang panjang antar anak bangsa, antar golongan dan antar pemikiran yang ada di Indonesia, sebab Indonesia adalah negara yang multikulturalisme dari berbagai aspek. Pada faktanya hingga saat ini tetap saja ada, sebagian kelompok yang memperdebatkan dasar negara dan ideologi negara Pancasila.

Menurut Yudi Latif, Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar falsafah negara, pandangan hidup dan ideologi kenegaraan bangsa Indonesia. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. John Gardner cendekiawan Amerika Serikat, mengingatkan “tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar (Latif, 2015:389).

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa suatu bangsa sebenarnya wajib memiliki konsepsi yang jelas dalam kemajuan bangsanya, dan Indonesia sebenarnya telah memiliki perihal tersebut dalam Pancasila. Bahkan

telah tertuang dengan jelas dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga perdebatan terkait dasar negara Pancasila harus dikembalikan kepada sejarah awal pendirian bangsa ini, bahwa dasarnya ialah Pancasila.

Menurut Reni Mayerni, ketahanan ideologi Pancasila kembali diuji ketika dunia masuk pada era globalisasi di mana banyaknya ideologi alternatif merasuki ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa (Redaktur, 23 Oktober 2021, Lemhannas.go.id).

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengenai tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati Bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi (Redaktur, 23 Oktober 2021, Lemhannas.go.id).

Rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pertama, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Rekomendasi selanjutnya adalah membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan/atau pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Oleh karena itu, perlu ada kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (P3KN). (Redaktur, 23 Oktober 2021, Lemhannas.go.id).

Analisis Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Kemendikbud RI, Juandanilsyah menjelaskan bahwa Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuat

melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan penekanan pada teori dan praktik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh perkembangan global juga berdampak pada anak-anak. Pancasila di masa mendatang akan mempertahankan otoritas negara dan penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Menurut Hamdi Moeloek, seharusnya representasi sosial tentang Pancasila yang diingat orang adalah Pancasila ideologi toleransi, Pancasila ideologi pluralisme, dan Pancasila ideologi multikulturalisme. (Redaktur, 23 Oktober 2021, Lemhannas.go.id).

Salah satu contoh menurunnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan ialah implementasi nilai-nilai Pancasila terus memudar. Terdapat lima pokok permasalahan yang menyebabkan masalah ini terjadi, yaitu :

1. Permasalahan pertama adalah pemahaman, dimana pemahaman dan pengetahuan terkait Pancasila menurun dan bahkan kurang digemari oleh generasi kekinian;
2. Permasalahan kedua adalah eksklusivisme, yaitu maraknya kelompok yang menganggap lebih baik dan kuat daripada kelompok lain. terutama kelompok yang berdasarkan primordialisme. Bahkan cenderung membelah masyarakat menjadi beberapa kelompok yang saling berseberangan;
3. Permasalahan ketiga adalah kesenjangan sosial, dimana tingkat perbedaan antara si kaya dan si miskin begitu tajam dan mencolok.;
4. Permasalahan keempat ialah pelembagaan atau institusionalisasi menjadi, terdapat beberapa lembaga yang bertugas namun belum terdapat sinergi yang tepat dalam melakukan suatu aksi bersama.
5. Permasalahan kelima, keteladanan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, semua pihak yang merasa telah Pancasila harus menjadi *role model* bagi sekitarnya, kapanpun dan di manapun. Sebab masih banyak contoh keteladanan yang buruk dengan dibuktikan masih banyak kasus korupsi dan pejabat menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongannya (Redaktur, 22 Oktober 2021, www.medcom.id).

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya dari berbagai regulasi yang dikeluarkan semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini. Pada akhir-akhir ini beberapa kebijakan terkait penguatan pendidikan karakter telah dilakukan. Salah satunya ialah Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selain itu Pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menggerus kesatuan dan persatuan bangsa. Khususnya terkait radikalisme dan ekstrimisme yang berujung pada terorisme dengan mengeluarkan Perpres No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Menjawab tantangan dan perkembangan jaman Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam Renstra UTM memuat nilai-nilai Amanah, Peduli dan Kreatif (APiK) sebagai acuan pendidikan karakter di lingkungan UTM, serta *output* mahasiswa diharapkan memiliki sikap religiusitas dan nasionalisme sebagai cikal bakal lulusan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut Peraturan Rektor UTM Nomor 4/UN46/HK.01/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020-2024. Visi UTM adalah “Pada Tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura”. Sasaran strategis pada periode 2020-2024 salah satunya ialah peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan berbasis klaster, khususnya dalam proses belajar mengajar dan kegiatan kemahasiswaan, sehingga menghasilkan lulusan berpengetahuan, berkecakupan dan berkarakter yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasa perguruan tinggi (Peraturan Rektor Trunojoyo, Nomor 4/UN46/HK.01/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020-2024, hlm, 86).

Menurut Peraturan Rektor UTM Nomor 354/UN46/2018 tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Universitas Trunojoyo Madura, menegaskan bahwa nilai-nilai karakter di UTM ialah terdiri dari Amanah, Peduli dan

Kreatif (APiK). *Soft skill* mahasiswa dikembangkan melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan dan implementasi kurikulum pendidikan karakter APiK kepada seluruh mahasiswa. Salah satu implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan kemahasiswaan untuk menumbuhkembangkan pendidikan karakter ialah melalui pendalaman dan praktik kebangsaan (Petik), hal ini mulai dirintis sejak tahun 2020 dalam bentuk kegiatan seminar nasional 4 (empat) konsensus kebangsaan yang dihadiri oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan workshop kebangsaan terhadap duta UTM.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai model alternatif penguatan pendidikan karakter Pancasila yang ideal di masa kini dan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta paham wawasan kebangsaan di Indonesia. Tujuan dan manfaat penulisan dan penelitian ini ialah :

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang wawasan kebangsaan dan karakter Pancasila;
2. Menambah jaringan antar mahasiswa dan masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan bangsa dan Pancasila.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bidang kajian ilmu hukum.

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Soekanto dan Mamudji, 2014:13-14). Penelitian normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (Marzuki, 2010:35).

Hasil dari penelitian ini ialah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai permasalahan yang diajukan. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini akan berfokus menjawab permasalahan penguatan pendidikan karakter Pancasila dapat dilakukan di era kekinian dan wawasan kebangsaan dapat tertanam pada mahasiswa baru dalam perguruan tinggi.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah penguatan pendidikan karakter Pancasila wawasan kebangsaan. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kemudian menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*) yang mana fokus penelitian, meneliti tentang pelaksanaan program kemahasiswaan Petik di UTM.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian ini sesuai dengan tipe penelitian adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu : bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait penguatan pendidikan karakter Pancasila dan wawasan kebangsaan, bahan hukum sekunder, literatur, buku dan jurnal ilmiah terkait permasalahan dan bahan hukum tersier.

4. Teknik dan analisis data

- a. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi pustaka, studi dokumen dan studi catatan hukum. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan cara menentukan sumber data sekunder, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Data yang terkumpul kemudian diolah. Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi.
- b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan pendidikan karakter Pancasila yang ideal di masa kini dan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta paham wawasan kebangsaan di Indonesia

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan pemersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Singkat kata Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya (Latif, 2011: 41).

Kini permasalahannya adalah bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, akan keutamaan nilai-nilai Pancasila dan diamalkan secara konsisten

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini yang perlu dilakukan ialah proses radikalasi Pancasila. Radikalasi dalam arti revolusi gagasan, demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana negara ini ditata dan dikelola dengan benar. Radikalasi Pancasila yang dimaksud ialah 1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, 2) mengembangkan Pancasila sebagai ilmu, 3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk perundang-undangan, koherensi antarsila, korespondensi dengan realitas sosial, 4) Pancasila yang semula melayani kepentingan negara menjadi Pancasila yang melayani semua unsur negara, dan 5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara (Latif, 2011:47-48).

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah aktualisasi Pancasila dalam setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat (Munir, 2016: 209-210).

Menurut konsideran dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017, Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti, dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter (Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter).

Penguatan Pendidikan karakter (PPK) adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggungjawab satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan

kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan nasional revolusi mental (GNRM).(Pasal 1 Perpres Nomor 87 Tahun 2017).

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab (Pasal 3 Perpres Nomor 87 Tahun 2017).

RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (Pasal 1 angka 4 Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ektrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024).

RAN PE bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut lampiran Perpres No. 7 Tahun 2021, RAN PE ini mencakup 3 (tiga) pilar pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sebagai strategi dan program utamanya, yang meliputi (1) pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; (2) pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, penguatan Pendidikan karakter dilakukan secara terpadu dan tertata dalam regulasi dan kewenangan kelembagaan, kemudian pemerintah telah mengatur perihal tersebut dalam beberapa regulasi,

yang selanjutnya wajib di laksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam tataran lebih teknis dan terimplementasi pada masyarakat melalui strategi dan aksi bersama.

1. Model Alternatif Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila

Sikap nasionalisme harus dibarengi dengan upaya memahami Pancasila. Sebagai landasan dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai kebangsaan, dan harus menjadi generasi penerus bangsa yang dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu kembali kelak kepada generasi penerus bangsa selanjutnya. Dengan memahami Pancasila maka ciri kebangsaan dapat dikembangkan. Nasionalisme tidak terlepas dari keinginan untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, karena diperlukan untuk menanamkan pendidikan karakter pada setiap orang. Indonesia saat ini menghadapi era globalisasi ekonomi yang kompleks (Oktari dan Dewi, 2021:100).

Rajasa berpendapat bahwa pengembang karakter nasionalisme bangsa Indonesia adalah para generasi muda yang melewati tiga proses, sebagai berikut:

- a. Pembangun Karakter (*character builder*), para generasi muda memiliki peran dalam mewujudkan karakter positif bangsa dengan tekad yang kuat, demi mengangkat tinggi nilai budi pekerti serta mengaplikasikannya dalam semua kegiatan;
- b. Pemberdaya Karakter (*character enabler*), yaitu generasi muda jadi panutan dalam pengembangan karakter positif, dengan cara berinisiatif untuk membangun pikiran yang kritis, misalnya saat menyuarakan tentang penuntasan masalah-masalah yang ada;
- c. Perakayasa Karakter (*character engineer*), yaitu generasi muda memiliki peran dalam berprestasi baik itu ilmu pengetahuan maupun mengenai kultur bangsa Indonesia. Selain itu, generasi muda juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan personalitas baik bangsa yang sejalan dengan sesuai dengan kemajuan dunia (Regiani & Dinie Dewi, 2021:36).

Implementasi Pancasila pada praksis sosial semestinya diarahkan pada konstruksi model sosial di dalam menyikapi permasalahan sosial yang ditangkap sebagai permasalahan kolektif. Model sosial bermakna sebagai kerangka pikir yang menjadi acuan di dalam praksis sosial. Dalam konteks Indonesia, model sosial diidealkan melalui pelibatan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan fundamental. Oleh sebab itu, model sosial yang dimaksud di sini yaitu model sosial Pancasila yang mengacu pada ideal “Manusia Pancasila.” “Manusia Pancasila” bukanlah sebagai murni individu melainkan juga merepresentasikan kesatuan bangsa Indonesia sebagai identitas kolektif yang diikat oleh cita-cita bersama untuk mencapai keadaan yang adil dan makmur (Khasri,2021:90).

Menghadapi bonus demografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuah penguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Untuk menjadi ideologi yang hidup terdapat tiga indikator yaitu adaptif-aktif, responsif, dan aplikatif. Semua indikator ini harus melihat peluang-peluang yang selalu muncul dalam setiap perkembangan zaman termasuk era milenial saat ini. Penguatan nilai-nilai Pancasila ini sebagai sebuah orientasi yang menjadi kesepakatan bersama bahwa Pancasila merupakan harta warisan atau pusaka dari Ibu pertiwi untuk tetap menjadi sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetap berlandaskan pada akar budaya Indonesia (Anggono dan Damaitu, 2021: 42-43).

Menurut Agus Sutono, tahapan menuju arah pembentukan dan pengembangan karakter terdiri dari 1) tahap pengetahuan (*knowing*), 2) tahap pelaksanaan (*acting*) dan tahap kebiasaan (*habit*). Sementara itu komponen karakter baik terdiri dari moral *knowing*, moral *feeling*, dan moral *action*. Kemudian Prinsip-prinsip Pendidikan karakter terdiri dari promosi nilai-nilai dasar etika, menciptakan komunitas kepedulian dan memfungsikan mitra (Sutono, “Akar Kefilsafatan Pendidikan Moral dan Pembentukan Karakter”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan

oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 23 September 2021 dalam *zoom meeting*).

Menurut Titi Savitri Prihatiningsih, tujuan Pendidikan karakter ialah membangun landasan, membangun akhlak mulia, membangun warga negara dan membangun warga global yang demokratis. Pendidikan karakter harus dibangun melalui pembiasaan (*habituation*), pemahaman (*understanding*), dan penalaran (*reasoning*) yang dilakukan secara progresif. Pendidikan karakter di Indonesia dikembangkan dari catur sumber nilai yaitu : filsafat negara, kesepakatan sosial, agama, adat dan budaya (Prihatiningsih, *Praktik Baik Pendidikan Karakter*”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam *zoom meeting*).

Menurut Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Bagian bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak anak kita. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesame, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil (Johan, “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Masyarakat”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 2 Oktober 2021 dalam *zoom meeting*).

Visi kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2020-2024 mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global (Samsuri, “sejarah Pendidikan Moral dan Karakter Pancasila, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 24 September 2021 dalam *zoom meeting*).

Berdasarkan pemaparan di atas, banyak sekali tawaran model alternatif dalam penguatan Pendidikan karakter, baik berasal dari kementerian maupun masyarakat serikat lembaga sosial yang ada dimasyarakat, hal utama yang perlu digaris bawahi ialah Pendidikan karakter dan pengembangannya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengetahuan (*knowing*), tahap pelaksanaan (*acting*) dan tahap kebiasaan (*habit*). Kemudian ditentukan karakter-karakter seperti apa yang hendak dibentuk dan menjadi prinsip dan *output* pelaksanaan Pendidikan karakter.

2. Pendalaman dan Praktik Kebangsaan (Petik) UTM

Model penguatan Pendidikan karakter yang telah dan sedang dilakukan di UTM dapat dijadikan alternatif atau rujukan dalam penguatan Pendidikan karakter Pancasila di perguruan tinggi. Sesuai visi-misi yang telah tertuang dalam renstra UYM 2020-2024 pelaksanaan Pendidikan karakter berlandaskan pada nilai nilai APiK. Dan terbagi dalam 4 kategori yaitu : Mentoring Keagamaan, Mentoring Kebangsaan, Mentoring Kewirausahaan, Mentoring Kebahasaan.

Pada kesempatan ini yang dibahas ialah mentoring kebangsaan yang dinamakan Pendalam dan Praktik Kebangsaan (Petik). Bidang kemahasiswaan UTM memiliki program dan kegiatan untuk mewujudkan mahasiswa yang berintelektual, bertakwa, penuh kreasi, inovasi dan solusi. Salah satu hal yang menjadi wadah dalam melakukan pengembangan penalaran, pemahaman dan kepedulian sosial terhadap kebangsaan ialah pendalaman pemahaman terkait kebangsaan. Guna meningkatkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia dan memperkuat rasa persatuan Indonesia (Boemiya dkk, 2020: 1).

Guna mahasiswa UTM semakin berkembang dan berinovasi serta memiliki wawasan kebangsaan yang mempersatukan bangsa maka perlu untuk melakukan evaluasi dan model pembelajaran inovatif. Salah satunya adalah Petik UTM. Program dan kegiatan ini adalah sarana untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme dan menangkal radikalisme dengan fanatisme sempit. Petik UTM diharapkan bermanfaat untuk Mahasiswa, Fakultas, dan Universitas serta masyarakat yang berada dalam

lingkungan UTM. Oleh karena itu, melihat kondisi dan realita yang ada, maka sangat perlu diadakan dan dilaksanakan Petik UTM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Mahasiswa tentang kebangsaan, sehingga UTM akan memiliki lulusan yang berwatak dan berkarakter persatuan bangsa (Boemiya dkk, 2020: 1).

Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang kebangsaan 2. Menambah jaringan antar mahasiswa dan masyarakat dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 3. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan persatuan bangsa (Boemiya dkk, 2020: 1).

Mentoring kebangsaan dalam bentuk Petik UTM di kampus merdeka Universitas Trunojoyo Madura merupakan sebuah model pembinaan generasi muda bangsa Indonesia yang telah diterima di kampus merdeka UTM. Hal ini disebabkan mentoring kebangsaan merupakan bentuk pembinaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di antaranya : 1) Didapatnya pemantauan yang lebih intensif dan melekat dari seorang mentor terhadap perkembangan kualitas peserta mentoring. 2) Lebih mendalamnya pengenalan terhadap peserta mentoring, sehingga mentor dapat menerapkan pendekatan secara khusus kepada tiap peserta. 3) Terbangunnya Nasionalisme yang lebih kokoh antar peserta mentoring. 4) Lebih dimungkinkannya pembinaan dapat berlangsung secara kontinyu (Boemiya dkk, 2020: 1).

Materi Petik UTM terdiri dari :

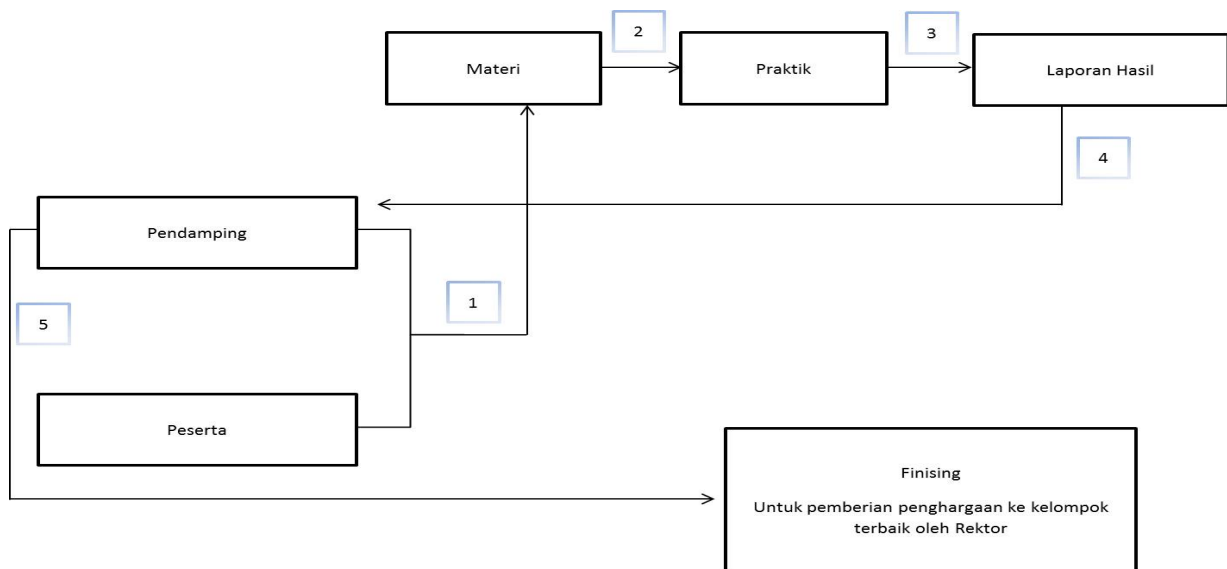
- a. Esensi dan urgensi identitas nasional Pancasila sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter
- b. Dinamika historis dan urgensi wawasan nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia
- c. Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen kolektif Kebangsaan (Boemiya dkk, 2020: 1).

Petunjuk teknis mentoring kebangsaan : pendalaman dan praktik kebangsaan (Petik) UTM sebagai berikut (Boemiya dkk, 2020: 1).

- a. Dosen Pengajar Pancasila dan Kewarganegaraan
 - 1) Membina mentor dalam proses pelaksanaan Petik UTM;
 - 2) Melakukan komunikasi aktif baik dengan mentor dan mahasiswa baru dalam pelaksanaan petik UTM;
 - 3) Memberikan arahan materi dan tugas praktik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kekinian;
 - 4) Berkoordinasi dengan tim petik UTM.
- b. Mentor (pendamping)
 - 1) Menghubungi dan berkoordinasi dengan dosen Pengajar Pancasila dan PKN terkait petik UTM;
 - 2) Menyampaikan materi yang sudah ditentukan dalam modul petik dengan menggunakan LMS Google classroom;
 - 3) Membuat kelompok pada peserta yang mengikuti materi, menggunakan *google classroom*
 - 4) Setiap kelompok maksimal 10 orang;
 - 5) Setiap Kelompok melaksanakan tugas praktik yang sudah ditentukan oleh pendamping;
 - 6) Tugas praktik berbentuk aktualisasi, observasi dan wawancara meliputi : mengunjungi museum nasional/daerah, monumen nasional/daerah/, tempat bersejarah, terjun ke masyarakat, pekerja (pelaku) seni dan budaya, pelaku ekonomi kreatif/UMKM/Koperasi, menggali potensi daerah, studi ketokohan dan cerita kepahlawanan rakyat), dan mengunjungi objek wisata alam, kuliner, budaya, dll sesuai dengan tema tugas serta dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila;
 - 7) Menerima laporan hasil tugas praktik kebangsaan berupa video atau film dokumenter yang telah di *publish/share* di Youtube, Instagram, Twitter dan media sosial lainnya dengan hastag #petikutm #pemersatubangsa #trunoyomuda #dariMadurauntukIndonesia
 - 8) Mentor Menilai dan membuat laporan kegiatan.
- c. Peserta (Mahasiswa Baru UTM)

- 1) Berperan aktif dan berkomunikasi secara baik dengan dosen pengajar Pancasila dan PKN serta mentor PETIK UTM;
- 2) Mendapatkan materi PETIK UTM dan berdiskusi aktif antar sesama mahasiswa;
- 3) Mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan sebagai tambahan bagian dari penguatan Pendidikan karakter dan nilai – nilai kebangsaan;
- 4) Melaksanakan praktik PETIK UTM sesuai tugas dari pendamping;
- 5) Menyerahkan laporan tugas praktik sesuai ketentuan dengan waktu yang sudah ditentukan.

Skema Sederhana Petik UTM



Bentuk Kegiatan Petik UTM terdiri dari : Rapat Koordinasi Dengan Dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Rekrutmen mentor dan *training of trainer (tot)*, *Stadium Generale* dan Seminar Nasional, Diskusi kebangsaan, *Workshop* Kebangsaan, Praktik kebangsaan, Podcast kebangsaan, dan Laporan tugas kekinian (*paper less*).

Contoh jadwal dan sesi kegiatan aktualisasi (praktik kebangsaan)¹

Kegiatan

Deskripsi	Penjelasan
Tema Kegiatan	Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter
Jenis Kegiatan	Wawasan Kebangsaan
Obyektif	Mengenali dan memahami Identitas Nasional
Metode	Jurnalisme etnografi, observasi, dan interview
Alat	Laptop dan paket data (wifi)
Waktu	Dapat dilaksanakan Bulan Oktober-November 2021 1 hari penyampaian materi kemudian diberikan tugas praktik sesuai tema materi
Langkah-langkah kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pendamping menyampaikan materi terkait dengan Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter ❖ Mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas praktik terkait dengan Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter ❖ Selama kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahasiswa mengerjakan tugas perktik ✓ Pendamping membimbing, memperhatikan dan memantau kerja praktek mahasiswa ✓ Mahasiswa dan pendamping berdiskusi aktif GCR, Gmeet atau whatsapp ✓ Mengumpulkan hasil kegiatan di GCR maupun di media lainnya. ❖ Setelah kegiatan: penilaian oleh pendamping

Sumber: Modul Program Kemahasiswaan Pendalaman dan Praktik Kebangsaan (Petik) UTM Tahun 2021, hlm, 3.

Berdasarkan pemaparan dalam bentuk narasi, petunjuk teknis dan contoh kegiatan telah jelas arah Pendidikan karakter dari bidang kemahasiswaan UTM, yang mana menekankan penanaman Pendidikan karakter dilakukan dengan berbagai langkah dan tahapan sesuai pola Pendidikan karakter. Tahap pertama terkait pengetahuan (*knowing*) dilakukan dengan pemberian materi dari dosen kepada mentor dan mentor kepada peserta dalam hal ini mahasiswa baru. Kemudian tahap pelaksanaan (*acting*) program petik ini melakukan Langkah yang terbilang terobosan dan alternatif menarik dengan memadukan dosen, mentor dan mahasiswa baru dan memberikan materi dan tugas praktik yang tertata dan sesuai perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya tahap kebiasaan (*habit*) mengedepankan mahasiswa baru untuk menggali nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila tidak jauh dari lokasi dan tempat asal mahasiswa tersebut, sehingga sangat masuka di akal penerapan implementatifnya dan menimbulkan kebiasaan baru terkait pola Pendidikan karakter diawali dari daerah atau lingkungan terkecil sesuai tempat tinggal dan asalnya.

KESIMPULAN

1. Penguatan Pendidikan karakter dilakukan secara terpadu dan tertata dalam regulasi dan kewenangan kelembagaan, kemudian pemerintah telah mengatur perihal tersebut dalam beberapa regulasi, yang selanjutnya wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dalam tataran lebih teknis dan terimplementasi pada masyarakat melalui strategi dan aksi bersama.
2. Model alternatif dalam penguatan Pendidikan karakter dan pengembangannya dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap pengetahuan (*knowing*), tahap pelaksanaan (*acting*) dan tahap kebiasaan (*habit*). Kemudian ditentukan karakter-karakter seperti apa yang hendak dibentuk dan menjadi prinsip dan *output* pelaksanaan Pendidikan karakter
3. Pendidikan karakter dari bidang kemahasiswaan UTM, yang mana menekankan penanaman Pendidikan karakter dilakukan dengan berbagai langkah dan tahapan sesuai pola Pendidikan karakter. Tahap pertama terkait pengetahuan (*knowing*) dilakukan dengan pemberian materi dari dosen kepada mentor dan mentor kepada peserta dalam hal ini mahasiswa

baru. Kemudian tahap pelaksanaan (*acting*) program petik ini melakukan alternatif menarik dengan memadukan dosen, mentor dan mahasiswa baru dan memberikan materi dan tugas praktik yang tertata dan sesuai perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya tahap kebiasaan (*habit*) mengedepankan mahasiswa baru untuk menggali nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila tidak jauh dari lokasi dan tempat asal mahasiswa tersebut, sehingga sangat masuka di akal penerapan implementatifnya dan menimbulkan kebiasaan baru terkait pola Pendidikan karakter di awali dari daerah atau lingkungan terkecil sesuai tempat tinggal dan asalnya. **Petik UTM** adalah salah satu model alternatif penguatan pendidikan karakter Pancasila yang ideal di masa kini dan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta paham wawasan kebangsaan di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. dan Damaitu, E. R. (2021). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam pembangunan Nasional menuju Indoensia Emas. Dalam Jurnal Keindonesiaan, Vol. 01, No. 01, April 2021.
- Boemiya, H dkk. (2020). Buku Pedoman Pendalaman dan Praktik Kebangsaan Universitas Trunojoyo Madura. Bangkalan : UTM Press.
- Johan, A. B. (2021). “Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan Masyarakat”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 2 Oktober 2021 dalam *zoom meeting*.
- Khasri, M. R. K. (2021). “Pancasila dalam Praksis Sosial : Manusia Pancasila Menjawab Permasalahan Masyarakat Digital”, dalam Jurnal Keindonesiaan, Vol 01, No. 01 April 2021.
- Latif, Y. (2011). Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2015). Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dalam buku Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara-Bangsa, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Marzuki Peter M. (2010). *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Muhamamad, Abdulkadir.(2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Oktari D dan Dewi, D. A. (2021). “Pemicu Luntarnya Nilai Pancasila Pada generasi Milenial”, dalam Jurnal PEKAN, Vol. 6 No 1 edisi April 2021.
- Prihatiningsih, T. S. (2021). Praktik Baik Pendidikan Karakter”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam *zoom meeting*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.
- Peraturan Rektor UTM Nomor 354/UN46/2018 tentang Kurikulum Pendidikan Karakter Universitas Trunojoyo Madura.

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 4/UN46/HK.01/2021 tentang Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020-2024..

Soekanto S dan Mamudji Sri. (2014). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Regiani Ega & Dewi D. A. (2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di era Globalisasi, dalam Jurnal Kewarganegaraan, Vol 5 No 1 Juni 2021.

Samsuri.(2021). “sejarah Pendidikan Moral dan Karakter Pancasila, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 24 September 2021 dalam *zoom meeting*.

Sutono, A. (2021). “Akar Kefilsafatan Pendidikan Moral dan Pembentukan Karakter”, bahan materi disampaikan dalam kursus Pendidikan Karakter yang diadakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, pada tanggal 23 September 2021

UTM. (2021). Modul Program Kemahasiswaan Pendalaman dan Praktik Kebangsaan (Petik) UTM Tahun 2021, hlm, 3.

Internet:

<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/844-pancasila-di-tengah-era-globalisasi>,

<https://www.medcom.id/nasional/politik/aNrwMBVb-lima-penyebab-pudarnya-pancasila>,